

**PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI
KESEHATAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(SDGS) DI PROVINSI SUMATERA BARAT**



Skripsi Oleh

SRI RAHMA WITTA

01021181823163

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI KESEHATAN
DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DALAM PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Disusun Oleh :


Nama : Sri Rahma Witta
NIM : 01021181823163
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 18 Juli 2022


Ketua : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Tanggal : 18 Juli 2022


Anggota : Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.SE
NIP. 199406232019031012

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI
PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI
KESEHATAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGS) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Disusun Oleh:

Nama : Sri Rahma Witta
NIM : 01021181823163
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 2 Agustus 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2 Agustus 2022

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E
NIP. 199406232019031012

Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 23-8-2022
FARULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Rahma Witta
NIM : 01021181823163
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing:

Ketua : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Anggota : Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E
Tanggal Ujian : 2 Agustus 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 3 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan,

ASLI
13-8-2022
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Sri Rahma Witta

Nim. 01021181823163

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan pengangguran terhadap kemiskinan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGS) di Provinsi Sumatera Barat dengan metode data panel.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sabaik-baiknya kepada para akademisi, pemerintah, mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat luas pada umumnya serta para pihak yang berkepentingan.

Inderalaya, 3 Agustus 2022

Penulis,



Sri Rahma Witta

Nim. 01021181823163

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, semangat dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sebagai hamba-Nya sehingga diberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Zainuddin dan Ibu Farida selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan rela berkorban demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Riki Zakriya, Melliza Hastuti, Irwandi Rahmat, Rahmaddani dan Debi Andriani selaku kakak kandung dan kakak ipar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si dan Bapak Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan masukan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Imelda, S.E., M.S.E selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya serta telah membantu memberikan kritik, saran, masukan dan nasihat untuk skripsi saya.
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangat kepada saya ketika saya membutuhkan bimbingan akademik selama menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasihat kepada saya selama proses perkuliahan.

8. Para dosen dalam lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan pemahaman materi dan ilmu yang bermanfaat selama menjalani proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf, Pegawai, dan Pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu saya dalam mengurus seluruh administrasi dan kepentingan lainnya saat menjalani proses perkuliahan dan bimbingan.
10. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Kampus Inderalaya yang selalu memberi warna dan banyak makna selama proses perkuliahan saya.
11. Teman-teman Konsentrasi Keuangan Daerah Angkatan 2018 yang telah bersama-sama dalam menjalani perkuliahan selama beberapa semester.
12. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Febriyanti, Ilham Setiawan dan Rizal Sujarwo yang telah memberikan keceriaan, semangat, hiburan serta menjadi teman belajar dan berdiskusi selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan untuk terus semangat dalam menjalani proses perkuliahan.

Inderalaya, 3 Agustus 2022

Penulis,



Sri Rahma Witta

Nim. 01021181823163

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA FUNGSI KESEHATAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh:

Sri Rahma Witta; Anna Yulianita; Alghifari Mahdi Igamo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan pengangguran terhadap kemiskinan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari data *cross section* yaitu data 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan data *time series* yaitu data tahun 2016-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda data panel dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,048088 dan signifikan, belanja fungsi kesehatan memiliki pengaruh negatif dengan koefisien sebesar -0,095445 dan signifikan sedangkan pengangguran memiliki pengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,001206 dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020.

Kata kunci: *Sustainable Development Goals (SDGs), Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, Pengangguran dan Kemiskinan*

Ketua



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

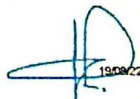
Anggota



Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E
NIP. 199406232019031012

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M., Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF SPENDING ON EDUCATION FUNCTIONS, SPENDING ON HEALTH FUNCTIONS AND UNEMPLOYMENT ON POVERTY IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN WEST SUMATRA PROVINCE

By:

Sri Rahma Wittia; Anna Yulianita; Alghifari Mahdi Igamo

This study aimed to analyze the effect of spending on education functions, spending on health functions and unemployment on poverty in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in West Sumatra Province. The data used in this study was panel data consisting of cross section data, data of 19 districts/cities in West Sumatra Province and time series data, data from 2016 to 2020. The analysis technique used is multiple linear regression of panel data with Fixed Effect Model approach. The results showed that education function expenditure had a positive effect and significant with a coefficient of 0,048088, health function expenditure had a negative effect and significant with a coefficient of -0,095445, while unemployment had a positive effect and not significant with a coefficient of 0,001206 on poverty in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) of districts/cities in West Sumatra Province in 2016-2020.

Keywords: *Sustainable Development Goals (SDGs), Spending on Education Functions, Spending on Health Functions, Unemployment and Poverty*

Chairman



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Member



Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E
NIP. 199406232019031012

Approved by,
Head of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, S.E., M., Si
NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Sri Rahma Witta

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Sintuk, 04 Agustus 1999

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Rimbo Karanggo, Nagari Sintuk, Kecamatan
Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang
Pariaman, Sumatera Barat

Alamat Email : sriahmawitta@gmail.com

Nomor Telpn : 0822-8838-8851

Pendidikan Formal :

 Sekolah Dasar : SD Negeri 06 Rimbo Karanggo

 SLTP : MTsN 9 Padang Pariaman

 SLTA : MAN 1 Padang Pariaman

 Strata 1 (S1) : Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi :

 2018-2019 : Anggota Departemen Kaderisasi Ukhuwah FE
Unsri

 2018-2019 : Anggota Departemen Kerohanian Persatuan
Mahasiswa Tuah Sakato

 2018-2019 : Anggota Departemen Infokom KEIMI FE Unsri

 2019-2020 : Manajer Departemen Infokom KEIMI FE Unsri



2019-2020 : Anggota Departemen Medinfo U-READ Unsri

Pengalaman Pelatihan :

2020 : Pelatihan Photoshop Guru *Creative*

2020 : Pelatihan *Design Training Project* 1.0 Imepa FE
Unsri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Praktis.....	11
1.4.2 Manfaat Akademis	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	12
1. Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave	12
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner.....	13

3.	Teori Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman.....	14
2.2	Telaah Konseptual.....	17
2.2.1	Kemiskinan	17
2.2.2	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	20
2.2.3	Pengeluaran Pemerintah	23
1.	Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan	23
2.	Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan.....	24
2.2.4	Pengangguran.....	25
1.	Pengertian Pengangguran.....	25
2.	Dampak Pengangguran.....	26
2.3	Penelitian Terdahulu.....	27
2.4	Kerangka Pemikiran	33
2.5	Hipotesis	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	36
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.2	Rancangan Penelitian	37
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3.1	Jenis Data	37
3.3.2	Sumber Data.....	37
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5	Teknik Analisis	38
3.5.1	Analisis Regresi Data Panel.....	38
3.5.2	Uji Kesesuaian Model.....	39
1.	Model <i>Pooled Least Square</i> (<i>Common Effect Model</i>)	39
2.	Model Pendekatan Efek Tetap (<i>Fixed Effect Model</i>).....	40
3.	Model Pendekatan Efek Acak (<i>Random Effect Model</i>)	40
3.5.3	Uji Pemilihan Model.....	41

1. Uji Chow	41
2. Uji Hausman	41
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	42
1. Uji Asumsi Normalitas.....	42
2. Uji Autokorelasi.....	43
3. Uji Heteroskedastisitas	43
4. Uji Multikolinearitas	43
3.5.5 Uji Hipotesis.....	44
1. Uji-F	44
2. Uji-t	45
3.5.6 Definisi Operasional Variabel.....	45
1. Belanja Fungsi Pendidikan (BFP).....	45
2. Belanja Fungsi Kesehatan (BFK)	46
3. Pengangguran (UE).....	46
4. Kemiskinan (KM)	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Perkembangan Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	48
4.1.2 Perkembangan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	54
4.1.3 Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	58
4.1.4 Perkembangan Pengangguran pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	60
4.1.5 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	63
4.1.6 Uji Pemilihan Model.....	64
1. Uji Chow	64
2. Uji Hausman	64

4.1.7 Uji Asumsi Klasik	68
1. Uji Normalitas.....	68
2. Uji Autokorelasi.....	68
3. Uji Heteroskedastisitas.....	69
4. Uji Multikolinearitas	70
4.1.8 Uji Hipotesis.....	70
1. Uji-F	70
2. Uji-t	71
4.2 Pembahasan.....	72
4.2.1 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	72
4.2.2 Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	75
4.2.3 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2016-2020	3
Tabel 1.2.	Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	5
Tabel 1.3.	Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	7
Tabel 1.4.	Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2016-2020	9
Tabel 4.1.	Perkembangan Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	49
Tabel 4.2.	Perkembangan Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Milik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	52
Tabel 4.3.	Perkembangan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	55
Tabel 4.4.	Perkembangan Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2016-2020	58
Tabel 4.5.	Perkembangan Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Jiwa).....	61
Tabel 4.6.	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Metode <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i>	63
Tabel 4.7.	Hasil Pemilihan Menggunakan Uji Chow	64
Tabel 4.8.	Hasil Pemilihan Menggunakan Uji Hausman	64
Tabel 4.9.	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	65
Tabel 4.10.	Hasil Intersep Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	67
Tabel 4.11.	Hasil Uji Autokorelasi Data Panel	68
Tabel 4.12	Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Panel.....	69
Tabel 4.13.	Hasil Uji Multikolinearitas Data Panel.....	70

Tabel 4.14. Hasil Uji-F Data Panel.....	70
Tabel 4.15. Hasil Uji-t Data Panel.....	71
Tabel 4.16 Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 4.17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan Pekerja Tidak Penuh di Sumatera Barat Tahun 2016-2020	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	14
Gambar 2.2. Teori Peacock dan Wiseman.....	15
Gambar 2.3. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	16
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Data.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penduduk Miskin Indonesia	91
Lampiran 2.	Pertumbuhan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan.....	91
Lampiran 3.	Pertumbuhan Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan.....	92
Lampiran 4.	Pertumbuhan Pengangguran Terbuka	93
Lampiran 5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	93
Lampiran 6.	Hasil Regresi Data Panel: <i>Common Effect Model</i>	94
Lampiran 7.	Hasil Regresi Data Panel: <i>Fixed Effect Model</i>	95
Lampiran 8.	Hasil Regresi Data Panel: <i>Random Effect Model</i>	96
Lampiran 9.	Hasil Uji Chow	96
Lampiran 10.	Hasil Uji Hausman.....	98
Lampiran 11.	Hasil Uji Normalitas	98
Lampiran 12.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	99
Lampiran 13.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan sebuah kesepakatan global yang memuat konsep pembangunan dengan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kehidupan sosial secara berkelanjutan, memelihara serta mempertahankan kualitas lingkungan, menjamin keadilan dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

SDGs disetujui saat pertemuan global yang diadakan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2015. Perwakilan dari 193 negara termasuk Indonesia menghadiri pertemuan tersebut. SDGs berlaku selama 15 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs memiliki 4 pilar, 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator dalam skala global. Dalam skala nasional ada total 319 indikator, 231 di antaranya sesuai untuk tingkat provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

SDGs menjadi peningkatan dari *Millennium Development Goals* (MDGs), yang berakhir pada tahun 2015. Sebagian besar dari tujuan MDGs telah berhasil dicapai Indonesia, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*. Indikator tersebut di antaranya yaitu penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dalam segala bentuk (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan hidup yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia (Itang, 2017). Indonesia telah melakukan banyak upaya dalam mengurangi angka kemiskinan. Selama tahun 2016-2020 proporsi penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2016 masyarakat miskin di Indonesia berjumlah 10,70 persen atau 27,76 juta jiwa dan turun menjadi 10,19 persen atau 27,55 juta jiwa pada tahun 2020 (lampiran 1).

Penurunan angka kemiskinan nasional merupakan wujud dari penurunan angka kemiskinan yang ada pada tingkat provinsi. Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tumbuh negatif dari tahun 2016 sampai 2020 adalah Provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari capaian SDGs Sumatera Barat untuk tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan diketahui bahwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Sumatera Barat tahun 2016 sebanyak 372.901 jiwa atau 7,09 persen dan turun menjadi 347.565 jiwa atau sebanyak 6,28 persen pada tahun 2020.

Tabel 1.1. Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Limapuluh Kota	28.274	7.59	26.899	7.15	26.525	6.99	26.701	6.97	26.310	6.86
2	Agam	37.624	7.83	36.734	7.59	32.984	6.76	33.158	6.75	35.717	6.75
3	Kepulauan Mentawai	13.150	15.12	13.051	14.67	13.051	14.44	13.275	14.43	12.574	14.35
4	Padang Pariaman	36.394	8.91	34.750	8.46	33.244	8.04	29.521	7.1	29.929	6.95
5	Pasaman	20.883	7.65	20.436	7.41	20.355	7.31	20.266	7.21	21.469	7.16
6	Pesisir Selatan	35.929	7.92	35.600	7.79	34.989	7.59	36.557	7.88	38.386	7.61
7	Sijunjung	17.194	7.6	16.901	7.35	16.615	7.11	16.715	7.04	15.936	6.78
8	Solok	34.124	9.32	33.386	9.06	32.945	8.88	29.782	7.98	30.576	7.81
9	Tanah Datar	19.647	5.68	19.281	5.56	18.494	5.32	16.213	4.66	16.355	4.4
10	Bukit Tinggi	6.837	5.48	6.782	5.35	6.339	4.92	6.020	4.6	5.495	4.54
11	Padang Panjang	3.489	6.75	3.235	6.17	3.116	5.88	3.005	5.6	2.951	5.24
12	Padang	42.853	4.68	43.894	4.74	44.178	4.7	42.567	4.48	39.998	4.4
13	Payakumbuh	8.381	6.46	7.747	5.88	7.713	5.77	7.704	5.68	7.886	5.65
14	Sawahlunto	1.346	2.21	1.233	2.01	1.478	2.39	1.354	2.17	1.407	2.16
15	Kota Solok	2.600	3.86	2.511	3.66	2.300	3.3	2.300	3.24	2.034	2.77
16	Pariaman	4.482	5.23	4.500	5.2	4.412	5.03	4.212	4.76	3.863	4.1
17	Pasaman Barat	4.484	7.4	31.000	7.26	31.983	7.34	31.673	7.14	30.390	7.04
18	Dharmasraya	16.423	7.16	15.732	6.68	15.517	6.42	15.584	6.29	14.241	7.16
19	Solok Selatan	11.967	7.35	11.940	7.21	11.899	7.07	12.544	7.33	13.015	7.35
Sumatera Barat		372.901	7.09	365.586	6.87	357.908	6.65	349.325	6.42	347.565	6.28

Sumber : SDGs Indonesia (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2016-2020, data diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan capaian SDGs untuk tujuan pertama tanpa kemiskinan dengan indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2020. Berdasarkan data capaian tersebut diketahui bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan yaitu 7,09 persen pada tahun 2016 dan menjadi 6,28 persen pada tahun 2020.

Pencapaian Sumatera Barat dalam penurunan kemiskinan demi keberhasilan SDGs termasuk baik secara nasional, namun masih dibawah target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam mengakhiri kemiskinan yaitu menurunnya penduduk miskin menjadi 5,50 persen pada tahun 2021.

Hal tersebut tentunya memerlukan banyak upaya untuk bisa menurunkan kemiskinan demi pencapaian SDGs di Sumatera Barat. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah Sumatera Barat di antaranya melalui alokasi dan distribusi belanja pemerintah. Alokasi dan distribusi belanja pemerintah untuk program dan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pembangunan yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan sehingga harus menjadi prioritas pemerintah (Wahyudi, Hamzah dan Syahnur, 2014).

Dalam merumuskan anggaran pembangunan dan pengentasan kemiskinan, pemerintah membagi belanja menjadi beberapa fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja berdasarkan fungsi terdiri dari fungsi ekonomi, pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan, pariwisata dan budaya, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, ada beberapa kelompok belanja yang dapat dibelanjakan pemerintah untuk masyarakat miskin yang disebut *pro-poor budget*, meliputi belanja untuk pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, dan jalan-jalan perdesaan (Nursini *et al.*, 2018).

Belanja pemerintah untuk pendidikan dapat berdampak pada kemiskinan, karena dalam banyak hal, pendidikan memegang peranan penting demi mencapai kesejahteraan pribadi. Pendidikan seseorang juga

berkorelasi positif dengan kemampuan pendapatan, sehingga belanja pendidikan harus menjadi fokus belanja pemerintah. Prioritas belanja pemerintah untuk pendidikan pasti akan berdampak pada peningkatan pendidikan yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Widodo, Waridin dan Maria, 2011).

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dibandingkan dengan belanja untuk fungsi yang lain, belanja fungsi pendidikan di Sumatera Barat tahun 2016-2020 merupakan belanja terbesar yang dicapai dengan realisasi sebesar Rp147,375 miliar tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp3,029 triliun pada tahun 2020.

Tabel 1.2. Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan (Miliar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Limapuluh Kota	107,323	514,841	496,381	513,021	482,273
2	Agam	623,715	558,036	558,964	590,561	548,717
3	Kepulauan Mentawai	32,571	163,713	178,415	178,096	168,133
4	Padang Pariaman	553,753	499,608	551,653	592,322	525,243
5	Pasaman	360,522	344,402	334,409	343,938	329,884
6	Pesisir Selatan	597,869	569,366	561,772	589,105	572,593
7	Sijunjung	327,066	298,658	297,080	283,942	292,513
8	Solok	453,390	450,342	446,873	473,299	446,350
9	Tanah Datar	74,353	465,438	467,926	466,291	431,959
10	Bukit Tinggi	213,627	149,411	160,386	193,101	190,028
11	Padang Panjang	150,724	116,984	126,928	134,112	136,743
12	Padang	904,327	644,342	735,495	791,755	687,482
13	Payakumbuh	223,203	185,562	171,366	189,500	175,308
14	Sawahlunto	139,178	131,656	134,558	136,322	121,076
15	Kota Solok	31,892	104,994	55,780	156,862	120,700
16	Pariaman	191,423	133,998	130,771	152,166	142,702
17	Pasaman Barat	364,233	361,534	359,137	373,140	362,796
18	Dharmasraya	260,522	254,222	263,982	297,950	303,874
19	Solok Selatan	63,931	194,874	221,563	233,302	222,807
Sumatera Barat		147,375	1.922,225	2.967,171	3.185,363	3.029,424

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2020.

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Realisasi belanja fungsi pendidikan terbesar di Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 berada di Kota Padang dan terendah berada di Kota Solok. Sedangkan daerah dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja fungsi pendidikan tertinggi di Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 adalah Kabupaten Tanah Datar yaitu 129,70 persen dan terendah adalah Kota Pariaman dengan pertumbuhan realisasi belanja fungsi pendidikan negatif 5,57 persen (lampiran 2).

Sama seperti belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan, belanja pemerintah untuk fungsi kesehatan juga diprioritaskan bagi masyarakat miskin. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan memerlukan tenaga kerja berkualitas sebagai modal awal pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, anggaran kesehatan yang besar perlu dialokasikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif, sehingga bisa memperkaya kehidupan masyarakat dan mengeluarkan dari kemiskinan (Nofriza, 2021).

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia (Mankiw, 2008). Modal manusia dapat mengacu pada kesehatan yang merupakan inti dari kesejahteraan dan menjadi tujuan dasar pembangunan daerah.

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, belanja fungsi kesehatan di Sumatera Barat merupakan realisasi belanja terbesar

kedua setelah belanja fungsi pendidikan. Tahun 2016 realisasi belanja fungsi kesehatan di Sumatera Barat sebesar Rp638,240 miliar dan meningkat menjadi Rp653,547 miliar pada tahun 2020. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia sehingga dapat melakukan kegiatan yang produktif dan bisa mengurangi kemiskinan (Sukarman, Marwa dan Husin, 2016).

Tabel 1.3. Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan (Miliar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Limapuluh Kota	38,122	136,370	156,181	177,645	190,400
2	Agam	164,376	175,016	216,502	249,055	259,486
3	Kepulauan Mentawai	53,887	128,224	165,101	146,923	129,657
4	Padang Pariaman	147,351	151,237	155,262	211,585	228,420
5	Pasaman	142,880	194,893	214,910	230,103	221,994
6	Pesisir Selatan	195,074	193,203	213,712	258,709	283,741
7	Sijunjung	112,501	109,277	137,887	131,212	120,072
8	Solok	120,660	113,484	148,956	179,768	171,007
9	Tanah Datar	37,005	188,523	199,087	251,643	240,009
10	Bukit Tinggi	38,722	43,072	66,268	70,822	185,672
11	Padang Panjang	114,161	118,043	126,289	134,037	144,501
12	Padang	210,678	261,536	317,230	312,803	322,572
13	Payakumbuh	147,309	149,343	150,266	171,260	162,674
14	Sawahlunto	85,177	95,355	102,543	119,614	139,743
15	Kota Solok	7,315	75,637	75,576	84,464	70,293
16	Pariaman	48,035	55,857	69,282	90,640	98,719
17	Pasaman Barat	144,940	163,486	275,215	259,424	283,735
18	Dharmasraya	95,627	149,095	159,051	200,549	237,203
19	Solok Selatan	57,977	112,645	132,198	161,817	210,924
Sumatera Barat		638,240	609,821	714,428	711,590	653,547

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2020.

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan pada setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2020

mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Realisasi belanja fungsi kesehatan terbesar di Sumatera Barat tahun 2016-2020 berada di Kota Padang dan terendah berada di Kota Solok. Sedangkan daerah dengan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja fungsi kesehatan tertinggi di Sumatera Barat tahun 2016-2020 adalah Kota Solok yaitu sebesar 232,23 persen per tahun dan terendah adalah Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 2,50 persen per tahun (lampiran 3).

Selain belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan juga diperlukan fokus pemerintah pada masalah pengangguran. Pengangguran merupakan seseorang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja, sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2010).

Pengangguran dapat berdampak pada permasalahan dimensi lainnya, di antaranya kemiskinan. Ketika terjadi kenaikan pengangguran, maka tingkat kemiskinan juga ikut naik, hal ini karena pengangguran mengakibatkan seseorang tidak mempunyai penghasilan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Safira, Hasibuan dan Tambunan, 2021). Selain itu, pengangguran juga menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi berkurang sehingga terjadi kemiskinan (Sejati, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, tahun 2016-2020 tingkat pengangguran pada setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi dengan tingkat pengangguran di Kota berada di atas

tingkat pengangguran di Kabupaten. Daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi di Sumatera Barat tahun 2016-2020 adalah Kota Padang. Hal ini karena pertumbuhan penduduk dan persaingan kerja yang tinggi, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sedangkan daerah dengan jumlah pengangguran terendah di Sumatera Barat tahun 2016-2020 adalah Kepulauan Mentawai, hal ini karena tradisi masyarakat yang dekat dengan alam dan banyak yang bercocok tanam.

Tabel 1.4. Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Pengangguran Terbuka (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Limapuluh Kota	3.223	5.045	5.521	4.729	6.248
2	Agam	5.729	9.581	11.944	11.878	11.702
3	Kepulauan Mentawai	3.500	865	1.038	1.479	2.063
4	Padang Pariaman	12.017	12.095	13.45	11.335	16.254
5	Pasaman	3.097	8.914	7.821	7.31	7.297
6	Pesisir Selatan	12.137	12.128	13.253	13.77	1.5309
7	Sijunjung	3.475	3.578	3.65	4.327	6.475
8	Solok	7.542	10.422	10.977	8.9	9.323
9	Tanah Datar	3.689	6.183	7.067	5.694	8.597
10	Bukit Tinggi	5.307	4.185	4.834	4.002	5.274
11	Padang Panjang	6.711	1.279	1.353	1.177	1.994
12	Padang	8.889	39.844	41.831	39.523	65.014
13	Payakumbuh	10.223	2.307	2.737	2.829	4.664
14	Sawahlunto	7.290	1.922	1.956	2.206	2.709
15	Kota Solok	8.700	1.889	1.982	2.294	2.962
16	Pariaman	8.851	2.385	2.481	2.454	2.411
17	Pasaman Barat	5.363	7.783	6.728	9.608	9.979
18	Dharmasraya	4.898	3.953	4.861	6.493	7.25
19	Solok Selatan	5.263	4.345	5.215	4.341	5.084
Sumatera Barat		125.903	138.703	148.699	144.349	190.609

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2016-2020

Tabel 1.4 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2020, dengan tingkat pengangguran yang mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Selama tahun 2016-2020, diketahui bahwa jumlah pengangguran di Sumatera Barat memiliki pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,62 persen per tahun (lampiran 4). Hal ini dapat menyebabkan banyak masyarakat tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan, sehingga terjadi kemiskinan.

Melihat fenomena tersebut, belanja pemerintah untuk pendidikan, belanja pemerintah untuk kesehatan dan pengurangan angka pengangguran merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari kemiskinan agar mencapai tujuan SDGs. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji “Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan pengangguran terhadap kemiskinan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan pengangguran terhadap kemiskinan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, terdapat juga beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan dalam mengelola realisasi belanja daerah.
- b. Sebagai literatur dan sumber pengetahuan bagi pembaca tentang faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Akademis

- a. Sebagai bacaan dan rujukan bagi akademisi baik dosen ataupun mahasiswa dalam memahami masalah kemiskinan dan faktor yang berpengaruh demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
- b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adria, H., Akhirmen, A., & Adry, M. R. (2017). Analisis Pemetaan Wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 175-186.
- Angraini, Muchtolifah, & Sishadiyati. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 87–96.
- Ansori, D. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Faktor – Faktor Kemiskinan di Indonesia. *Accelerating the World's Research*.
- Anyanwu, J. C., & Anyanwu, J. C. (2017). The Key Drivers of Poverty in Sub-Saharan Africa and What Can Be Done About it to Achieve the Poverty Sustainable Development Goal. *Asian Journal of Economic Modelling*, 5(3), 297–317. <https://doi.org/10.18488/journal.8.2017.53.297.317>.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Babasanya, A. O., Oseni, I. O., & Subair, A. S. (2018). Human Capital Development: A Catalyst for Achieving SDGs in Nigeria. *Acta Universitatis Danubius: Oeconomica*, 14(4), 25–41. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=131106686&site=ehost-live>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Edisi Kedua. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *SDGs Indonesia 2016-2020*. Jakarta: Bappenas. <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>. (Diakses pada 23 November 2021).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Kemiskinan Ekstrim: Konsep dan Definisi*. Jakarta: BPS. (Diakses pada 27 Agustus 2021).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pengeluaran untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial) sebagai Persentase Dari Total Belanja*

- Pemerintah (Persen)*. Jakarta: BPS. (Diakses pada 27 Agustus 2021).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kemiskinan dan Ketimpangan: Konsep dan Definisi*. Jakarta: BPS. (Diakses pada 27 Agustus 2021).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2016-2020*. Jakarta: BPS. (Diakses pada 27 Agustus 2021).
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2021) *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (Jiwa)*. Padang: BPS (Diakses pada 27 Agustus 2021).
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2021). *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2016-2021*. Padang: BPS. (Diakses pada 15 Juni 2022).
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2021). *Tenaga Kerja: Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota 2016-2020*. Padang: BPS. (Diakses pada 20 Desember 2021).
- Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on “Quality Education” from Micro, Meso and Macro Perspectives. *International Review of Education*, 65(2), 277–294. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>.
- Chugh, S., Mathur, M., Rawat, P., & Pal, S. K. (2020). A Systematic Study on Sustainable Development Goal: in Special Reference No Poverty. *Studies in Indian Place Names*, 40(56), 1612–1622.
- Darmayanti, C., Nadirsyah, & Abdullah, S. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Kesehatan Pada Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Kebangsaan*, 5(9).
- Darwin, I., Safitri, H. W., & Zulkaidi, D. (2016). Peranan Tanah Ulayat sebagai Land Banking dalam Perkembangan Kota Bukittinggi. In *ASPI National Seminar 'Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota'*. Padang (Vol. 25).
- Daulay, M. T. (2017). Model Pengendalian Kemiskinan dengan Pendekatan Diversifikasi Usaha, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Economic Value (Studi pada Daerah Pemekaran di Sumatera Utara). *QE Journal*, 06(03), 203–221.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 145–155.
- Digdowiseiso, K. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS).

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016-2020*. Jakarta. (Diakses pada 26 Agustus 2021).
- Erwin, E. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Mentawai Melalui Penguatan Kelembagaan Lokal di Pulau Siberut. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 1-14.
- Fadly, Inat, F., Iryanto, M., & Quilim, C. A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 123–129.
- Fan, S. Gen, & Cho, E. E. Y. (2021). Paths Out of Poverty: International Experience. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 857–867. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63295-6](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63295-6).
- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia : Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 33(2), 143–167. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 130–136.
- Gebila, & Wulandari, A. (2020). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2018. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 3(2), 23–34.
- Ginting, F. V. B., Sijabat, N. A. A., & Lubis, R. A. (2012). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Simalungun. *Academia*, 117–127.
- Gujarati, Damodar N. (2008). *Basic Econometrics*. Singapore: The Mc Graw-Hill Companies.
- Gujarati, Damodar N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Terjemahan)*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Hatta, M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Wilayah Ajatappareng. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1, 39–48.
- Hilmi, Marumu, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.

- Hutajulu, D. M., Septiani, Y., & Simamora, J. M. (2021). Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 108–127.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2015). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6(2), 159–167.
- Istifaiyah, L. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013). *Jurnal Ilmiah*, 1–19.
- Itang, I. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1-30.
- Kemdikbud. (2022). *Jumlah Data Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index41.php?kode=080000&level=1>). (Diakses pada 15 Juni 2022).
- Kuncoro, Mudrajad (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Liando, I. I. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. 6(22).
- Lior, N., Radovanovic, M., & Filipovic, S. (2018). Comparing Sustainable Development Measurement Based on Different Priorities: Sustainable Development Goals, Economics, and Human Well-Being—Southeast Europe Case. *Sustainability Science*, 13(4), 973–1000. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0557-2>.
- Mandagi, T. S. W., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Pertanian dan Perikanan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Lima Kabupaten di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2), 90–112.
- Mangkoesobroto. (2010). *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. (2008). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Melati, A. M., Sudrajat, & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Muana, N. (2001). *Makro Ekonomi, Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mucecekithinji, A. (2019). The Effect of Government Expenditure on Fiscal Deficits in Kenya. *The International Journal of Science & Technoledge*,

7(2), 219–242. <https://doi.org/10.24940/theijst/2019/v7/i2/st1902-028>.

- Mufidah, R., Musamus, U., & Education, J. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 521–527.
- Muhyiddin, Nurlina T., M. Irfan Tarmizi & Anna Yulianita. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustamin, S. W., Agussalim, & Nurbayani, S. U. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, 4(2), 165–173.
- Nenbee, S. G., Njoku, F. N., Vite, B. N., & Otovwe, E. E. (2021). Defence Spending, Unemployment and Poverty in Nigeria: An Econometric Analysis. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 8(5), 41–51.
- Nofriza, E. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan di Kota Jambi. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(4).
- Nursini, N., Agussalim, A., Suhab, S., & Tawakkal, T. (2018). Implementing Pro Poor Budgeting in Poverty Reduction : A Case of Local Government in Bone District, South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 30–38.
- Palanewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap IPM dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.
- Panjawa, J. L., & Triyanto, J. (2020). The Role of Human Development and Decentralization toward Poverty Through Economic Growth. *Gorontalo Development Review*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.32662/golder.v3i1.930>.
- Paul, S. (2002). *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths, A Catalyst Working Paper*. London: Catalyst.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025*. Tuapejat.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (2018). *Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan*

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. Padang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2016-2020*. Padang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Postula, M., & Raczkowski, K. (2020). The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. *Journal of Competitiveness*, 12(1), 125–144. <https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.08>.

Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP*, 7(3), 416–444.

Qian-Qian, L. I. U., Man, Y. U., & Xiao-lin, W. (2015). Poverty Reduction Within the Framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research*, 6(1), 67–73. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2015.09.004>.

Rahmania, M., Wulandari, E. T., & Sari, W. P. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.

Rambe, R. A., & Purmini, P. (2020). Kemampuan Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris dari Sumatera dan Jawa. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i1.10996>.

Rosa, Y. Del. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat*. 4(2), 318–325. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.113>

Safira, R., Hasibuan, M., & Tambunan, K. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Journal Of Management, Accounting, Economics and Business*, 02(04), 574–587.

Saputri, S. F., & Anwar, P. H. (2019). Interelasi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Economics, Social, and Development Studies*, 6(1), 91–110.

- Sejati, D. P. (2020). Pengangguran serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 98–105. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.313>.
- Shaleh, M. M., Mallongi, S., & Rahman, Z. (2021). Pengaruh Pengangguran, Indeks pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia*, 8(2).
- Sileika, A., & Bekerytè, J. (2013). The Theoretical Issues of Unemployment, Poverty and Crime Coherence in the Terms of Sustainable Development. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 2(3), 59–70. [https://doi.org/10.9770/jssi.2013.2.3\(5\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2013.2.3(5)).
- Simanullang, I. S., Edy, J. K., & Aminah, S. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Dan Pembangunan Daerah*, 6(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarman, Rina, Taufiq Marwa, & Tadjuddin Husin. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 10(1), 61–78.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumardjoko, I. (2017). Multidimensi Karakteristik Kemiskinan di Indonesia serta Pemodelannya Terhadap Belanja Pemerintah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2), 1–25.
- Sumodiningrat, G. (2009). *JPS dan Pemberdayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Surya, A. (2021) Kebijakan dan Praktik Pemilikan Rumah: Kajian Kasus di Kota Metropolitan Medan. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 10(1), 200-206.
- Susanti, E. N., & Sartiyah. (2019). Determinan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Dimensi*, 8(2), 249–265.

- TN, M. R. S., & Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Info Artha*, 2(1), 11–28.
- Vladimirova, K., & Le Blanc, D. (2015). How Well are the Links Between Education and Other Sustainable Development Goals Covered in UN Flagship Reports? *Department of Economic & Social Affairs*, 146, 32. <http://www.un.org/en/development/desa/policy/2111educationandsdgs.pdf>.
- Vorontsova, A., Vasylieva, T., Bilan, Y., Ostasz, G., & Mayboroda, T. (2020). The Influence of State Regulation of Education for Achieving the Sustainable Development Goals: Case Study of Central and Eastern European countries. *Administratie Si Management Public*, 2020(34), 6–26. <https://doi.org/10.24818/amp/2020.34-01>.
- Wahyudi, R., Abubakar, Hamzah., & Syahnur, S. (2014). Analisis Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 2(3), 49–59.
- Wahyuni, Sri. (2021). Pengaruh Pengangguran Terbuka Terdidik Universitas Terhadap Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen-Aceh*, XV(1), 9-14.
- Wardhana, A., & Kharisma, B. (2019). Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12, 1343–1366.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika (Pengantar dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widodo, A., Waridin, & Maria K, J. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.
- Yendra, M. (2021). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Isu Sustainable Development Goals (SDGs) Se-Kabupaten Pasaman. *Abdimas Journal of Mai Wandeu*, 1(1), 26–35.
- Yulianita, Anna, & Feny Marissa (2020). *Penerapan Aplikasi Software Pada Penelitian Ilmiah*. UPT. Penerbit dan Percetakan UNSRI.